



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 1 / 1 / 2025

TENTANG

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BINTAN TAHUN 2025

BUPATI BINTAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bintan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara repoublik Indonesia Nomor 6954);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perencanaan Pembentukan Peraturan Bupati Bintan Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar rencana Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Daftar Rencana Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

1. BUPATI BINTAN 1

4f ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI BINTAN TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BINTAN TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL PERKADA	PELAKSANAAN
1	INSEKTORAT DAERAH	PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025	JANUARI
2	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN	PEMBENTUKAN POS PELAYANAN KESEHATAN IKAN TERPADU (IKANDU)	
		UNIT PELAKSANA TEKNIS	
		PEMBENTUKAN BALAI BENIH IKAN	
		PEMBENTUKAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WISATA PANTAI TRIKORA TAHUN 2025-2045	MARET
		RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BANDAR SERI BENTAN TAHUN 2025-2045	MARET
		PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR JALAN	MARET
4	DINAS SOSIAL	PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS	MEI
		PETUNJUK PELAKSANA ORANG TERLANTAR / PEKERJA MIGRAN DI KABUPATEN BINTAN	MARET
		TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)	JUNI
5	DISKOMINFO	PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA/KELURAHAN	FEBRUARI
		RENCANA AKSI SP4N LAPOR TAHUN 2025-2030	APRIL
6	DPMPTSP	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MELALUI KLINIK LAYANAN BERBANTUAN TERINTEGRASI <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH</i>	FEBRUARI
		PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAM INVESTASI	APRIL
		RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BINTAN	MEI
7	DKPP KAB BINTAN	PEDOMAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	FEBRUARI
8	DLH	PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN	MEI
		PENGURANGAN SAMPAH	JULI
		PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KABUPATEN BINTAN	SEPTEMBER

9	DINAS KESEHATAN	RENCANA AKSI DAERAH AIDS,TUBERKULOOSIS DAN MALARIA KABUPATEN BINTAN	MEI
		PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025	
10	DP3KB KAB BINTAN	PENYELENGGARAN KABUPATEN LAYAH ANAK TAHUN 2024	MEI
11	DPAD	JADWAL RRETENSI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	MARET
		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	JUNI
12	DPMD KAB BINTAN	PENYUSUNAN APBDes 2025	JANUARI
		PROGRAM PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2025	JANUARI
		PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA	MARET
		PENGADAAN TANAH PEMERINTAH DESA	MARET
		PEMILIHAN KEPALA DESA	APRIL
		PENYUSUNAN APBDes 2026	JUNI
		PROGRAM PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2026	JUNI
		TATA CARA PENYERTAAN MODAL BUMDes	JUNI
		PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DESA	SEPTEMBER
		EVALUASI DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR DESA	SEPTEMBER
		PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA	MARETT
		SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA	MARET
DESA INSKLUSIF DAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA	MARET		
13	BAPENDA KABUPATEN BINTAN	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.	JANUARI S/D DESEMBER
		PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	JANUARI S/D DESEMBER
		PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	JANUARI S/D DESEMBER
		PEMBEBASA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	JANUARI S/D DESEMBER
		PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM	JANUARI S/D DESEMBER
		PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA	JANUARI S/D DESEMBER
		PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	JANUARI S/D DESEMBER
		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.	JANUARI S/D DESEMBER
		PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	JANUARI S/D DESEMBER

		TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH	JANUARI S/D DESEMBER
		TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK.	JANUARI S/D DESEMBER
		TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA	JANUARI S/D DESEMBER
		MENGENAI ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH	JANUARI S/D DESEMBER
		PEMBAYARAN PAJAK DAERAH MELALUI QRIS.	JANUARI S/D DESEMBER
		LAYANAN ONLINE PAJAK DAERAH.	JANUARI S/D DESEMBER
		PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	JANUARI S/D DESEMBER
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA	
		PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA	
		RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA	
		INPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	
		RENCANA KONTIJENSI BANJIR KABUPATEN BINTAN	
		PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA	
15	BKPSDM	PENERAPAN DISIPLIN DAN JAM KERJA ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	JANUARI
16	BAPELITBANG	RKPD KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026	JUNI
		RKPD KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029	AGUSTUS
		RENCANA KERJA BAPELITBANG TAHUN 2026	JULI
		RENSTRA BAPELITBANG TAHUN 2025-2029	SEPTEMBER
		PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025	AGUSTUS
		PERUBAHAN RENJA BAPELITBANG TAHUN 2025	SEPTEMBER
		RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH	SEPTEMBER
17	BKAD	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2025	JULI
		PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	SEPTEMBER
		ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026	SEPTEMBER

18	KESBANGPOL	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GNPN)	SEPTEMBER
19	BAG ORGANISASI	PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	JANUARI
		KELAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	FEBRUARI
		STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	MEI
		STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	MEI
		STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGAWAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	MEI
		KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	MEI
		KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	MEI
		NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	MEI
		ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BINTAN	NOVEMBER
20	BAG KESRA	PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BINTAN	JANUARI
		TAHAPAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI, MUBALIGH/MUBALIGHAH, IMAM MASJID, PENJAGA MASJID, PELAKSANA FARDHU KIFAYAH DAN PENGELOLA TPU SE KABUPATEN BINTAN	FEBRUARI
21	BAG PEMERINTAHAN	PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN TAMBELAN	
22	BAG HUKUM	PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEELGGARAAN BANTUAN HUKUM	JANUARI

BAG EKONOMI	PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI UMKM KABUPATEN BINTAN	JANUARI
	STANDAR PELAYANAN MINUMIN BLUD UPTD PUSKESMAS	JANUARI
	TARIF LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS	JANUARI
	RENCANA STRATEGIS BLUD UPTD PUSKESMAS DAN RSUD	JANUARI
	POLA TATA KELOLA BLUD UPTD PUSKESMAS	FEBRUARI
	PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN BATAS MASA KERJA HAK KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLAAN DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL	MARET
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD	JULI
	REMUNERASI PADA BLUD UPTD RSUD	JULI
	BARANG DAN JASA BLUD PUSKESMAS	JULI
	TATA CARA PENGHAPUSAN UTANG BLUD UPTD PUSKESMAS	AGUSTUS
	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED PETOLEUM GAS TERTENTU DI KABUPATEN BINTAN	NOVEMBER

BUPATI BINTAN



4 ROBY KURNIAWAN